

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA

Joseph E Lopulalan¹

Universitas Victory Sorong

josephlopulalan@gmail.com

Melvin Latuasan²

Universitas Victory Sorong

Kelvinlatuasa342@gmail.com

Abstrak

Penelitian dengan judul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa dilakukan guna mendapatkan gambaran tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam perumusan konsep dan penyusunan agenda pemberdayaan masyarakat dan proses apa saja yang dilakukan LPMK dalam melaksanakan agenda pemberdayaan masyarakat sesuai program Pemerintah Kelurahan Klagete. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara serta observasi lapangan dengan pengolahan data penelitian secara kualitatif yang melibatkan 8 (delapan) orang informan yang diambil sebagai sampel dengan cara *purposive sampling*. Keterangan para informan direduksi dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa LPMK Klagete sangat berperan dalam mengubah paradigma berpikir warga masyarakat tentang posisi mereka dalam program pembangunan dari sekedar menjadi objek pembangunan yang pasif dan tidak terkena dampak pemangunan menjadi pengagis, perumus dan pelaksana pembangunan bersama-sama dengan Pemerintah Kelurahan Klagete. Masyarakat Kelurahan Klagete mengalami peningkatan keberdayaan dalam segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik melalui kerjasamanya dalam program pembangunan yang difasilitasi oleh LPMK menggandeng lembaga pemerintahan lainnya seperti BLKI Sorong dan PKK Kelurahan Klagete. Pemerintah Kelurahan Klagete sangat tertolong dalam pelaksanakan program pembangunan dikarenakan koordinasi dan peran aktif LPMK Klagete.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Peran Lembaga, Pembagunan.

Abstrac

Research with the title Role of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in the Community Empowerment of Klagete Village, Malaimsimsa District was carried out in order to get an overview of the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMK) in the formulation of concepts and preparation of the community empowerment agenda and what processes LPMK does in implementing the empowerment agenda the community according to the Klagete Kelurahan Government program. This research was conducted using document study methods and interviews as well as field observations with qualitative research data



processing involving 8 (eight) informants who were taken as samples by purposive sampling. Information from the informants is reduced and analyzed qualitatively. This research finds that LPMK Klagete plays a very important role in changing the paradigm of thinking of community members about their position in the development program from being a passive development object and not being affected by development to being the initiator, formulator and implementer of development together with the Klagete Village Government. The people of Klagete Urban Village have experienced increased social, economic, cultural and political empowerment through their cooperation in development programs facilitated by LPMK in collaboration with other government agencies such as BLKI Sorong and PKK Klagete Village. Klagete Kelurahan government is very helpful in implementing development programs due to the coordination and active role of LPMK Klagete.

Keywords: *Community Empowerment, Role of Institutions, Development.*

1. PENDAHULUAN

Seiring pergeseran paradigma sosial dalam pembangunan masyarakat pada masa paradigm lama disebut dengan pembangunan yang berorientasi pada Negara dan modal, sedangkan pada paradigm baru disebut pemberdayaan yang terfokus pada masyarakat dan institusi local yang dibangun secara partisipatif dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternative-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai *depowerment* dari sistem kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religious, politis, ekonomis dan militan). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berdasarkan manusia dan kemanusiaan (*humanism*). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk kekuasaan yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Demikian juga aliran neo-marxis, freudianisme, dan sosiologi kritik yang menolak industrialisasi, kapitalisme dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal tersebut dapat mematikan manusia dan kemanusiaan. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan suatu sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan.

Manusia merupakan unsur pokok dalam pembangunan dan bukan saja berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan itu. Dengan melakukan pembangunan (masyarakat dalam strata pemerintahan terkecil khususnya), permasalahan menjadi fenomena utama yang menghambat keberhasilan pembangunan. Agar pembangunan dapat berhasil dan berdaya guna, dibutuhkan sikap kritis masyarakat dalam arti mampu berfikir, berkreasi serta bijaksana dalam menghadapi perubahan di segala aspek kehidupan sehingga hakekat pembangunan dan manfaatnya bagi kesejahteraan hidup manusia dapat tercapai.

Di dalam paradigm baru (pemberdayaan) dibutuhkan peran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sebagai kekuatan (*power*) utama pembangunan.

Sosiologi structural fungsionalis Parson menyatakan bahwa konsep *power* dalam masyarakat adalah variable jumlah. Menurut perspektif tersebut, *power* masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif. Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat dicapai jika ditunjang oleh adanya struktur social yang tidak berpengaruh negative terhadap kekuasaan. Dengan pengertian lain, kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat

berperan sebagai agen pembangunan. Pemberdayaan akan menjadi masalah bila secara konseptual pemberdayaan itu dibarengi oleh adanya *power* kelompok terhadap kelompok lainnya.

Power dalam masyarakat kapitalis tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonomi. *Power* ini bersinggungan erat dengan kepentingan-kepentingan kapitalis lewat kerjasama transnasional yang berskala global. Dalam keadaan semacam ini, pemberdayaan masyarakat miskin dibatasi oleh gerakan-gerakan kapitalis. Karena itu, masyarakat miskin dan sangat miskin harus diberdayakan untuk dapat berpartisipasi dengan lebih efektif dalam proyek dan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Pemberdayaan lebih diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan eksternal golongan atau kelompok penguasa, bukan sebagai tujuan internal dalam mencapai ketahanan sosial, partisipasi dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi krisis, Selain itu, orientasi pada pencapaian target kuantitatif dari proyek lebih dominan daripada orientasi pada pencapaian target fungsional melalui proses pemberdayaan yang sebenarnya. Hal ini merupakan kekacauan peristilahan atau *semantic confusion*, sebab secara ilmiah objektif dan bersandarkan kepada sumber-sumber referensi ilmiah, maka pemberdayaan berdasarkan perspektif sosiologi adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Secara paradoks, memberdayakan sistem lain, atau secara paternalistic melimpahkan kekuatan (*power*) kepada orang lain dapat juga berarti memberdayakan mereka.

Memberikan kekuatan akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan oleh Simon (1990) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*, berikut:

Pemberdayaan adalah suatu aktivitas refleksif, suatu proses yang mampu diinisiasi dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self-determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melalui masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, bukanlah suatu proses yang dipaksakan, atau kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendeklasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Proses dilakukan secara komulatif, sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini terutama di level desa/kelurahan. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan masyarakat kecil mestinya merupakan sinyal untuk lebih dilakukan pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat.

Berkaitan dengan masalah pemberdayaan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, dibentuklah apa yang disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan, pasal 211 ayat (2) yang berbunyi: Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa/kelurahan dan merupakan mitra

dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan yang dimaksud adalah Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berfungsi untuk membantu pemerintah desa sekaligus mitra dalam upaya memberdayakan masyarakat desa.

2. KAJIAN TEORI

Pemberdayaan Masyarakat

Gagasan pemberdayaan masyarakat berangkat dari realitas objektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumber daya masyarakat (Margot Breton, 1994).

Konsep lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas (Sutoro Eko, 2004)

Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial seseorang untuk lebih meningkatkan kemandirian dan keswadayaannya untuk menuju hidup yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang termuat dalam UUD 1945.

Hulme dan Turner dalam R. Hikmat (2004) mengemukakan pendapatnya mengenai pemberdayaan, yaitu : “ pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran (marjinal) yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional”. Selain itu dikatakan pula bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan dan kekuasaan (*power*) yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Dari pengertian yang diungkapkan Hulme dan Turner dapatlah disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial oleh orang-orang pinggiran (masyarakat pedesaan) untuk memberikan pengaruh yang besar dalam penghidupan politik baik lokal maupun nasional melalui upaya peningkatan kemandirian dan keswadayaannya demi kondisi yang lebih baik.

Sedangkan menurut Paul (1987), pemberdayaan dalam literatur pembangunan adalah “pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dari pada hasil-hasil pembangunan”.

Dari pengertian Paul di atas dapatlah dikatakan bahwa dalam pemberdayaan diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pengamanan akses sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan, serta adanya partisipasi dalam arena politik masyarakat untuk memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Dari beberapa definisi di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah seluruh proses kegiatan meningkatkan kekuatan (*power*), dan partisipasi masyarakat melalui pengembangan kemauan dan kemampuan (kapasitas) untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang terkandung di sekitar lingkukan masyarakat baik yang berupa Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertumpu pada aspek pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh sebab itu dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang
- b. Memperkuat potensi/ daya yang dimiliki masyarakat melalui bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, lembaga pendanaan dan pemasaran
- c. Melindungi melalui keberpihakan kepada masyarakat yang lemah
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat dalam masyarakat desa

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah besar, karena dengan adanya suatu imbalan yang selaras dan serasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dapat menimbulkan dan menumbuhkan pemberdayaan dari masyarakat dalam membangun desanya atas dasar kemampuan dan kekuatan secara mandiri.

Berdasarkan hal itu, maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Seluruh kegiatan dilakukan secara transparan dan diketahui oleh anggota masyarakat secara luas
- b. Seluruh anggota masyarakat harus berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pemeliharaan
- c. Meningkatkan dan memfasilitasi lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat lainnya
- d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum
- e. Seluruh kegiatan dapat diukur dan dinilai dari tingkat keberhasilan program. Seluruh kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Bangsa Indonesia harus sepakat dan memiliki visi yang sama untuk mempertahankan momen paradigma pemberdayaan ini karena merupakan pendekatan dan peluang yang tepat untuk membentuk bangsa Indonesia yang memiliki ketahanan dan kemampuan mengimbangi bangsa-bangsa lain terlebih dalam menghadapi tantangan global.

Pembangunan nasional sendiri pada hakikatnya adalah usaha peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dan strategis dengan memperhatikan konsep pembangunan sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat sendiri dalam rangka pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memiliki 2 (dua) makna pokok, yakni:

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penetapan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam aspek kebijakan dan program-program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- b. Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya

Melalui upaya pemberdayaan masyarakat akan terwujud keberdayaan yang memiliki unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang
2. Memperkuat potensi/ daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian masukan berupa bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah
3. Melindungi masyarakat dengan sikap keberpihakan kepada masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, namun bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi sosial.

Pemberdayaan masyarakat akan membawa implikasi terhadap tugas pokok dan fungsi dari instansi pemberdayaan masyarakat desa, yaitu menyeimbangkan pendekatan politisasi rakyat dengan pembangunan masyarakat, agar masyarakat desa tidak terpolarisasi akibat perbedaan afiliasi politik yang dapat mengakibatkan desintegrasi sosial. Bila desintegrasi sosial terjadi

maka terpulih konflik lokal yang dapat merontokkan lembaga solidaritas pada komunitas lokal yang bersifat tradisional yang pada giliranya akan menghancurkan prinsip *community development*.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat, dibutuhkan beberapa akses, yakni:

- a. Akses terhadap sumber daya
- b. Akses terhadap teknologi, yakni suatu kegiatan dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien
- c. Akses terhadap informasi pasar, termasuk penyediaan sarana produksi dan peningkatan ketrampilan berusaha
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan

Sebagai eksekutor utama program pembangunan, pemerintah desa hadir sebagai mitra kerja lembaga pemberdayaan masyarakat yang sangat penting untuk memiliki etika pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Adapun etika pembangunan yang perlu dipenuhi oleh aparat pemerintah adalah:

- a. Memahami aspirasi masyarakat
- b. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri
- c. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang banyak namun terbaik bagi masyarakat
- d. Menciptakan instrumen dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berpihak pada yang lemah

Jika pemberdayaan masyarakat didukung oleh aparat pemerintahan yang memenuhi etika di atas akan memungkinkan masyarakat untuk membangun dirinya atas dasar potensi, aspirasi, kewenangan, kelembagaan serta prioritas kebutuhannya. Dengan demikian akan terwujud kemandirian masyarakat sebagai wadah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat.

2. Arah Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dapat dipahami dengan sangat beragam oleh orang ditinjau dari sudut pandang dan kelembagaannya, dari sudut pandang politik maupun sudut pandang sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, mandirikan, mengswadaya dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah (grassroot) terhadap kekuatan-kekuatan penekan yang terjadi di segala bidang dan sektor kehidupan.

Secara spesifik pemberdayaan masyarakat desa terjelaskan oleh beberapa cara pandang di bawah ini:

- a. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah sebagai objek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar dalam hal ini pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek atau lebih jelasnya sebagai agen atau partisipan yang bertindak yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan layanan lainnya) kepada masyarakat merupakan kewajiban negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan memberikan ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah nasional. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat secara prinsipnya berurusan dengan upaya pemenuhan kebutuhan (needs) masyarakat. Banyak orang berargumen bahwa masyarakat akar rumput (grassroot) sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang bersifat utopis

(abstrak, tidak praktis) seperti demokrasi, desentralisasi, good governance, otonomi daerah, masyarakat sipil dan sebagainya. Mereka lebih membutuhkan pemenuhan sandang, pangan dan papan sebagai hal-hal yang dasariah bagi kehidupan mereka. Bagi mereka tidak akan ada manfaatnya jika isu demokrasi menjadi idaman jika rakyat tetap dalam keadaan yang tidak berubah menjadi lebih baik. Ketika negara memiliki banyak uang ketiga hal dasar itu akan terpenuhi, hal inipun masih andaian, karena persoalannya tetap terantuk pada sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sangat langka (scarcity) dan terbatas (constarin). Masyarakat tidak mudah mengakses sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bukan hanya itu masalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pun tersandung pada problematika struktural (ketimpangan, eksplorasi, dominasi, monopoli dan hegemoni) yang menimbulkan ketidakmerataan penyebaran sumber daya. Untuk itu kebutuhan akan partisipasi masyarakat (suara, akses, kepemilikan dan kontrol) menjadi sangat perlu dalam proses kebijakan dan pengelolaan sumber daya.

b. Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subjek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi di mana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirikan melakukan penyuaran, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumber daya dan relasi sosial-politik dengan negara. Untuk mencapai visi ideal tersebut kemampuan dan kemandirian itu harus tumbuh dari bawah atau dari masyarakat sendiri dengan penguatan oleh campur tangan pihak luar seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas sipil, organisasi agama serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi.

Pemberdayaan terbentang dari level psikologis personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Pemberdayaan psikologis personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi dan kontrol diri. Pemberdayaan struktural personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan psikologis masyarakat berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong-royong, saling pecaya (mutual trust), kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif.

3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan wahana untuk menentukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran (Moleong, 2004). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan apa-apa yang saat ini berlaku di dalamnya. Yang dimaksud di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang berlaku sekarang ini, terjadi atau ada (Mardalis, 1999:26).

Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, tindakan, perasaan, pengalaman, pengetahuan dan pandangan subyek penelitian, sehingga dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari realitas tersebut (Hamidi,2005:70).

Dengan demikian maka peneliti harus berusaha memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dengan mengaitkannya dengan variabel-variabel yang diteliti melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada informan atau responden untuk menyampaikan pikiran, pandangan, perasaan, pengetahuan dan pengalamannya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi suatu penelitian berkaitan erat dengan bentuk empirik dari suatu penelitian lapangan sebagaimana hakikatnya penelitian ini. Hal ini perlu sebagai bukti bahwa subjek dan objek yang diteliti benar-benar ada dan memberi sebagian sifat validnya penelitian ini.

Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong.

C. Sampel Sumber Data Penelitian

Sebelum menentukan sampel penelitian, sangatlah penting untuk lebih dulu mempertegas populasi penelitian ini. Adapun populasi penelitian adalah keseluruhan orang atau individu yang berhak dan representatif untuk dijadikan subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh masyarakat penerima pemberdayaan dan para anggota LPMD Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong.

Dari populasi penelitian ini kemudian sampel penelitian ditentukan dengan metode sampel bertujuan (*purposive sampling*) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sejalan dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih subgrup dari populasi sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih benar-benar memiliki karakteristik yang sama persis dengan populasi penelitian ini.

Untuk memperoleh dat primer penelitian ini peneliti mengambil sampel yaitu 4 (empat) orang anggota LPMK, sedangkan untuk data sekunder demi kepentingan triangulasi data penelitian peneliti menggunakan 4 (empat) orang informan sebagai sampel yang terdiri dari 2 (dua) orang perangkat kelurahan, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang masyarakat penerima manfaat pemberdayaan.

D. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar wawancara, namun yang memegang peran penting sebagai instrumen utama penelitian dengan pendekatan kualitatif ini adalah peneliti sendiri. Hal ini berlaku demikian mengingat penelitian kualitatif ini diusahakan untuk memperoleh deskripsi lengkap tentang fokus penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh untuk memperoleh data dan informasi. Keahlian peneliti untuk mendata dan mengolah wawancara menjadi rujukan utama instrumen penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selainnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2001:112). Dalam laporan penelitian ini data berupa kutipan-kutipan yang berasal dari naskah wawancara, catatan resmi, dokumen resmi yang diperoleh melalui teknik:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data, di mana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantaraan alat atau pun langsung dalam situasi kesenjangan (Winarno Surachmad, 1990:162).

2. Interview

Interview atau wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, berbentuk tanya-jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan

secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Ciri wawancara adalah adanya kontak langsung (tatap muka) dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau pengarsipan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu berupa pengumpulan data dengan jalan mencatat dokumen atau arsip yang ada di lokasi penelitian guna melengkapi data yang diperlukan. Dokumentasi digunakan sebagai bahan pembantu, pendukung dan pelengkap dalam penyusunan laporan penelitian. Hal yang dicatat oleh peneliti adalah apa saja yang telah masuk dalam arsip desa mengenai agenda pemberdayaan masyarakat.

F. Teknik Analisa Data

Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefenisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan rumusan ide yang disarankan oleh data dan sebagai usaha memberikan bantuan pada tema dan ide itu (Moleong 2004:103).

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa jawaban-jawaban atau keterangan-keterangan dan bukan angka-angka. Maka dari itu penelitian deskriptif kualitatif ini, data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diinterpretasikan berdasarkan pada fakta yang ada serta didukung oleh pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang valid.

G. Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri (Moleong 2004:178). Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang pada suasana penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang dengan pendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintah
5. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan

Dari hal-hal di atas peneliti berusaha mendapatkan validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran LPMK Sebagai Mitra Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran LPMK ialah tindakan yang dilakukan oleh LPMK dalam kaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Peran LPMK dapat dinilai dari program-program yang direncanakan maupun yang sudah berjalan dan yang sementara berjalan. Perumusan konsep dan penyusunan program pemberdayaan bersama pemerintah Kelurahan dan menempatkan posisi tawar masyarakat yang terrepresentasikan oleh kehadiran LPMK dan masyarakat dalam forum musyawarah kelurahan. Mengenai peran LPMK Kelurahan Klagete (JH

“ LPMK ini merupakan wadah koordinatif yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah di tingkat kelurahan guna memberdayakan masyarakat, untuk itu kami lebih bertindak sebagai sponsor yang mendorong masyarakat agar turut bertindak bagi kepentingannya, dan terhadap pemerintah kami cenderung menjadi penyumbang ide dan turut dalam pemberdayaan mulai dari proses perumusan konsep program. Ini kami lakukan dengan memberikan masukan bagi pemerintah akan apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk menjadi lebih berdaya, kami berpihak kepada kepentingan masyarakat, karena bagi kami pembangunan itu kewajiban pemerintah. Tanggung jawab kami adalah memastikan bahwa pembangunan berdampak positif bagi keberdayaan masyarakat.”

Dari hasil wawancara di atas penelitian ini mendapatkan kejelasan tentang posisi LPMK dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Klagete. Lembaga ini menyadari bahwa masyarakat belum dapat dengan mandiri mengambil bagian dalam pembangunan kelurahan, sementara pemerintah kelurahan pun sangat terikat dengan sistem pemerintahan yang mengatur segala geraknya sehingga seakan berada di luar jangkauan masyarakat untuk bermitra memberdayakan masyarakat. Dalam konteks inilah LPMK hadir sebagai pihak yang menjembatani gap ini dan mengambil fungsi koordinatif diantara keduanya.

Tentang bagaimana LPMK menjaring aspirasi masyarakat dan meneruskannya kepada pemerintah Kelurahan Klagete, peneliti telah mewawancarai seorang anggota LPMK lainnya (IB), yang mengemukakan tanggapannya sebagai berikut:

“Kami (LPMK) berisikan unsur-unsur warga dari 4 RW dengan latar belakang yang bervariasi supaya kami dapat mewakili aspirasi setiap kelompok warga yang kami wakili, dengan demikian masalah, keinginan, keluhan warga benar-benar kami pahami bahkan sangat tahu mana yang harus didahulukan, sebab masalah, dan keinginan mereka itu juga adalah masalah dan keluhan kami, ini yang kami sampaikan sambil mendorong warga yang kami wakili ini untuk menemukan jalan keluarnya. Ketika aspirasi ini terkoordinasikan kepada pihak kelurahan, kami juga mendorong warga untuk menunjukkan keinginan untuk berubah itu dengan mengambil bagian dalam proses pelaksanaannya.”

LPMK sendiri merupakan bagian dari masyarakat Kelurahan Klagete yang dengan kemampuan untuk merangkul, memahami dan mewakili kepentingan segenap masyarakat yang umumnya belum dapat menyalurkan aspirasi guna menyuarakan kebutuhan, harapan dan masalahnya kepada pihak pemerintah. Sebagai bagian dari masyarakat Kelurahan Klagete, LPMK dapat menyaring dan mengklasifikasikan aspirasi, kebutuhan, harapan dan masalah yang dihadapi masyarakat, menyusunnya menurut tingkat urgenitasnya bagi masyarakat dan mengkoordinasikan serta menawarkannya kepada pemerintah melalui jalur musyawarah penyusunan rencana pembangunan di tingkat Kelurahan.

Sejalan dengan dua pendapat yang ditampilkan di atas, anggota LPMK Kelurahan Klagete (MN) juga memberikan tanggapan dalam wawancara sebagai berikut:

“Banyak dari warga masyarakat yang merasa tidak tersentuh oleh program-program pembangunan namun tidak dapat menyatakannya secara baik, aspirasi yang dipendam ini melahirkan penolakan dan sikap terisolir terhadap upaya pemberdayaan, mereka lebih bersikap pasif, hanya mau terima gampang apa saja yang dilakukan pemerintah, ini yang buat mereka tidak dapat menjemput bola untuk maju. LPMK ada untuk mengubah kondisi ini, kami bagian dari mereka namun kami mau mengubah cara pandang, ini yang kami tunjukan kepada mereka, mendorongnya pelan-pelan sambil merangkul pihak kelurahan dan menawarkan cara-cara pemberdayaan, dengan begini kembali ada kerjasama. Hasilnya akan apa yang dibuat kelurahan dapat didukung oleh warga dan akhirnya tujuan untuk menjadi lebih baik itu bisa dirasakan.”

Ketimpangan pembangunan di Kelurahan Klagete tersirat dalam hasil-hasil wawancara di atas. Terlihat bahwa pembangunan terjadi tanpa ada keterlibatan masyarakat, seolah-olah apapun yang dilaksanakan pemerintah kelurahan hanya merupakan terapan rencana pemerintah semata, kekosongan peran warga dalam berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan menunjukkan lemahnya pengawasan warga akan proses pembangunan. Di sisi lain segala hal yang dikerjakan pemerintah seakan bukan diperuntukkan bagi warga melainkan konsekuensi dari kekuasaan pemerintah semata oleh karenanya pembangunan tidak menyelesaikan masalah warga bahkan berdampak menjauhkan warga dari kemungkinan untuk bertumbuh. Pada posisi inilah LPMK masuk sebagai stimulator semangat dan memperkecil kesenjangan yang terjadi.

Perubahan yang dialami warga Kelurahan Klagete dimulai oleh LPMK dengan menyadarkan bahwa warga memiliki andil besar dalam menentukan apa yang akan dikerjakan pemerintah bagi perbaikan keadaan kelurahan, setelah warga memiliki kesadaran ini LPMK mulai menjaring apa saja, mengapa dan bagaimana yang dibutuhkan warga. Dari segenap penjaringan ini LPMK juga membantu warga mengurutkan kebutuhan-kebutuhan itu menurut tingkatan kebutuhan dari yang paling peting hingga yang menjadi kebutuhan pengembangan kapasitas warga.

Berikut ini ditampilkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat (BP).

Dulunya setiap orang berusaha sendiri mengubah nasibnya dengan mencoba berusaha ini dan itu, kami punya niat tapi kami tidak punya pengetahuan yang banyak jadi semua dilakukan dengan apa yang ada dalam keterbatasan masing-masing. Jatuh bangun dan tidak bangkit lagi itu sudah kenyataan yang lumrah, ternyata ada jalurnya kami bisa ditolong oleh kelurahan tapi kami tidak mengetahuinya, bahkan kalau difasilitasi kelurahan semua urusan jadi lebih mudah, misalnya mau usaha modal ke bank, ijin-ijin maupun fasilitas dana bergulir. Bahkan kami boleh kasih masukan kepada kelurahan soal yang lainnya misalnya penanggulangan banjir, kebersihan lingkungan, sekarang kami sudah tahu jalurnya, ternyata kami baru sadar bahwa semestinya begitu.”



Penuturan BP di atas menunjukan bahwa sosialisasi program kemitraan antara pemerintah dan masarakat ini tidak menyentuh masyarakat, sehingga masyarakat berjalan sendiri dalam mengupayakan perubahan hidupnya, sementara pemerintah kelurahan pelaksanakan programnya namun tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Berkaitan dengan hal ini apa yang paparkan informan MN, JH dan IB sebelumnya memberikan bukti kuat bahwa warga memperoleh pencerahan lewat hadirnya LPMK yang membantu memfasilitasi perubahan ini dengan menyadarkan masyarakat akan fungsinya di dalam pembangunan serta membangun kemitraan antara warga masyarakat dan pemerintah untuk merencanakan program pembangunan di Kelurahan yang menyentuh benar sendi kebutuhan warga masyarakat dan sinkron dengan tujuan pembangunan pemerintah.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Pembentahan pemahaman warga akan perannya dalam pembangunan merupakan langkah awal yang jitu untuk mengembangkannya menuju keterlibatan langsung warga dalam proses pembangunan. Masyarakat diajak tidak untuk tidak hanya mampu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah namun menunjukan sumbangsih utuh berupa keterlibatan langsung dalam pelaksanaan segenap kegiatan pembangunan. Guna menjamin terakomodirnya gagasan dan aspirasi dari pihak warga maka LPMK harus memfasilitasi dan memastikan setiap warga masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah di tingkat Kelurahan terkhusus musyawarah penyusunan rencana pembangunan.

Dalam meningkatkan partisipasi warga Kelurahan Klagete dalam program pembangunan, LPMK Klagete mengajak dan melibatkan warga untuk aktif dalam pertemuan-pertemuan kelurahan guna pembahasan perumusan program pembangunan. Tentang hal ini peneliti telah mendapatkan hasil wawancara dengan Sekretaris LPMK Klagete (IB) sebagai berikut :

“Masyarakat sebenarnya antusias untuk mengikuti pertemuan-pertemuan semacam ini, ketika mereka tahu bahwa didalamnya mereka dapat kemukakan apa yang ingin mereka sampaikan, bahkan direkrut untuk terlibat sebagai pelaku dalam proyek-proyek yang diadakan. Di kelurahan kami ini, tingkat pengangguran masih tinggi juga masih banyak warga yang belum punya penghasilan tetap, jadi kehadiran mereka di pertemuan ini sekaligus menjadi momen tawar kami kepada pihak kelurahan untuk melibatkan mereka dalam proyek pembangunan, hasilnya dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka sendiri yang menikmati, dengan begini warga yang tadinya menganggur punya pekerjaan, bahkan terbaca potensi yang mereka miliki untuk kami kembangkan menjadi pelatihan-pelatihan yang memberdayakan mereka bukan saja pada proyek-proyek kelurahan tetapi membentuk kelompok kerja mandiri yang dapat menerima job-job dari pihak lain.”

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris LPMK Klagete, berikut ini ditampilkan hasil wawancara dengan seorang anggota masyarakat Klagete (RN) yang turut terlibat dalam program pemberdayaan LPMK Klagete dan sekarang telah mandiri mengembangkan kemampuan hasil fasilitasi pemberdayaan masyarakat oleh LPMK Klagete.

“Saya ini dulu nakal sekali, tetapi setelah ikut kerja dalam proyek bangun tempat sampah tahun lalu saya jadi tahu kerja tukang, selanjutnya dengan teman-teman pemuda lainnya kami melalui kelurahan didaftarkan ke BLKI Sorong untuk dapat pelatihan lanjutan, sekarang ini kami sudah jadi kelompok tukang yang bisa borong kerja. Selain itu kami sudah dapat mengatur kelompok kami dengan baik, sekarang ini sudah punya kerja tetap sebagai tukang borongan, syukur juga kelompok kami selalu dapat job baik dari kelurahan mau pun dari warga sendiri.”

LPMK Klagete melihat dan menindaklanjuti potensi masyarakat Klagete yang didominasi oleh kaum perempuan. Banyak dari kaum perempuan Kleurahan Klagete merupakan pengurus rumah tangga yang sebenarnya merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar bila dapat diberdayakan. Waktu para pengurus rumah tangga yang kebanyakan terbuang percuma dapat diisi dengan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan keluarga. Membaca potensi ini LPMK Klagete membentuk kelompok-kelompok pelatihan memasak dan ketrampilan lainnya bersama dengan PKK Kelurahan Klagete sehingga ibu-ibu dan kaum perempuan dalam Kelurahan Klagete dapat diberdayakan guna peningkatan pendapatan keluarga mereka. Hal ini terlihat jelas dalam wawancara kami dengan salah seorang anggota masyarakat Klagete (YW) berikut ini.

“Mama ini dulu usaha kolam kangkung, sekarang juga masih, tapi dengan kelompok PKK mama sudah punya ketrampilan buat kue-kue, alat-alat juga sudah lumayan, itu semua dapat dari bantuan kelurahan, bukan mama saja, ada juga ibu-ibu yang lain. Jadi sekarang sudah baiklah, karena kebutuhan ini sudah ditolong bukan dari usaha kolam kangkung itu saja tetapi dari ketrampilan kue-kue dan masak ini. Tra sampai situ saja, kami juga selalu dilibatkan di acara-acara kelurahan dan warga yang perlu kami punya kerja ini. Syukurlah, mama merasa tertolong sekali.”

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat yang diberdayakan telah mampu menunjukkan peningkatan kapasitas diri yang terindikasi lewat peningkatan taraf hidup yang bermula dari pembaharuan pemahaman akan berbagai paradigma kemajuan diri. Pihak-pihak yang mengusahakan pemberdayaan masyarakat juga dapat mengukur perannya untuk memberdayakan masyarakat dengan indikator di atas

Dalam kaitan dengan hal ini maka LPMK Klagete yang telah terbentuk dari tahun 2014 ini telah menunjukkan peran yang sangat signifikan ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran dan terselesaiannya kesalahan asumsi masyarakat terhadap pemerintah. Keikutsertaan masyarakat secara swadaya untuk membentuk kelompok-kelompok usaha, tingginya animo masyarakat Kelurahan Klagete untuk ikut serta dalam pelatihan-pelatihan dan proyek-proyek pembangunan di kelurahan selakigus merupakan indikator tumbuhnya pemahaman yang benar tentang posisi warga masyarakat sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.

Indikasi berhasilnya Pemerintah Kelurahan Klagete yang bermitra dengan LPMK Klagete adalah sharing power untuk mendorong perubahan masyarakat. Posisi LPMK sebagai lembaga koordinasi pemberdayaan masyarakat menjadi pengikat rasa kebersamaan yang tadinya senjang antara masyarakat yang tergolong mampu dengan masyarakat yang lemah dalam kelurahan, bahkan pemerintahan yang tadinya seakan hanya bergerak dalam urusan administratif berubah keberadaannya di mata dan hati warga kelurahan sehingga membentuk suatu kekuatan sinerjis yang mendobrak kesenjangan sosial menjadi suatu potensi perkembangan yang senantiasa ditindak lanjuti dengan program-program yang berkesinambungan.

Melaui penelitian ini, peneliti mendapatkan suatu simpulan akademik logis menyangkut peran LPMK atau yang secara umum dikenal dengan LPMD bahwa LPMK/LPMD sangat berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat, mereka berasal dan merupakan bagian dari masyarakat yang menjembatani kesenjangan kekuasaan, wewenang dan peran antara pemerintah dan masyarakat dengan memperbaiki ketimpangan kerja pemerintah dalam hal sosialisasi atau pemasyarakatan program pembangunan dan memacu respon positif masyarakat melalui penumbuhan kesadaran bahwa masyarakat bukan lagi objek pembangunan tetapi sekarang adalah pelaku atau subjek pembangunan itu yang harus terlibat dan berperan aktif mulai dari proses menentukan menu pembangunan yang paling warga butuhkan dan terlibat serta mengawasi pelaksanaannya dan pada akhirnya menikmatinya untuk menjadi semakin terberdayakan. Ini membuktikan apa yang dikemukakan Hulme dan Turner dalam R. Hikmat (2004).

Pemerintah dalam wewenang dan kekuasaan pemerintahannya terhadap rakyat sering memposisikan diri sebagai pihak yang punya absolute power atas rakyat sehingga lebih banyak mengambil peran mengatur. Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan yang terjadi dalam pendaratan program pembangunan di Kelurahan Klagete disebabkan karena minimnya sosialisasi atau pemasyarakatan program pembangunan sehingga pemerintah pada awalnya seumpama berjalan sendiri melakukan pemangunan. Dampaknya adalah pembangunan itu terasa tidak berguna dalam pandangan masyarakat karena tidak dapat menyembuhkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dampaknya adalah pembangunan itu terasa tidak berguna dalam pandangan masyarakat karena tidak dapat menyembuhkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Dalam konteks ini LPMK hadir sebagai bagian dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang mengerti keadaan masyarakat dan dapat menyelaraskannya dengan tujuan umum pembangunan sehingga dapat mengkoordinasikan hal yang tadinya senjang antara pemerintah dan masyarakat mengubahnya menjadi suatu potensi pemberdayaan masyarakat yang berkekuatan sangat besar. Pemerintah tidak dapat mengerti kehendak rakyat jika tidak berada di tengah masyarakat, pada posisi inilah LPMK berada dan berstrategi memenangkan baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pembangunan yang paripurna.

5. KESIMPULAN

1. LPMK Klagete sangat berperan dalam mengubah paradigma berpikir warga masyarakat tentang posisi mereka dalam program pembangunan dari sekedar menjadi objek pembangunan yang pasif dan tidak terkena dampak pemangunan menjadi

pengagas, perumus dan pelaksana pembangunan bersama-sama dengan Pemerintah Kelurahan Klagete.

2. Masyarakat Kelurahan Klagete mengalami peningkatan keberdayaan dalam segi soial, ekonomi, budaya maupun politik melalui kerjasamanya dalam program pembangunan yang difasilitasi oleh LPMK menggandeng lembaga pemerintahan lainnya seperti BLKI Sorong dan PKK Kelurahan Klagete.
3. Pemerintah Kelurahan Klagete sangat tertolong dalam pelaksanakan program pembangunan dikarenakan koordinasi dan peran aktif LPMK Klagete.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimiharja, Kusnaka, 2004. *Kata Pengantar Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung
- Craig dan Mayo dalam R. Hikmat, 2004. *Community Empowerment: Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung
- Eko Sutoro, 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta
- Hikmat, R. Harry, 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung
- Moleong, Lexy J., 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Karya, Bandung
- Nirwanta 2005. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Perumusan ,Kebijakan Pembangunan Desa*, STPMD “APMD”
- Pranarka dan Vidhyandika M., 1996. *Pemberdayaan*, CSIS, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta